

**LAPORAN AUDIT PKM
FAKULTAS HUKUM**



**GUGUS PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
2024**

Laporan Audit PKM

1. Tujuan

Audit Mutu Internal standar PKM dilaksanakan untuk mewujudkan sinergi antara dunia pendidikan dan masyarakat, meningkatkan kualitas diri dosen, serta memberikan manfaat yang nyata bagi perkembangan masyarakat secara luas. Tujuan dilaksanakan PKM bagi dosen yaitu memberikan kesempatan bagi dosen untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat. Melalui pengabdian, dosen dapat memahami masalah yang dihadapi masyarakat dan memberikan solusi berdasarkan keahlian yang dimiliki, sehingga tercipta hubungan yang lebih erat antara dunia pendidikan dan masyarakat, serta mengaplikasikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi yang dikuasai dalam membantu menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh masyarakat. Hal itu sebagai bentuk nyata dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yang mencakup pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. sekaligus membuka peluang untuk menjalin kolaborasi yang saling menguntungkan.

2. Hasil Rapat Tinjauan Manajemen (Tahun sebelumnya)

Pelaksanaan audit PKM tahun 2024 di Fakultas Hukum merupakan pengalaman pertama kalinya, mengingat Fakultas Hukum baru berdiri pada bulan April 2024. karena itu, belum ada hasil Rapat Tinjauan Manajemen dari tahun sebelumnya.

3. Tindakan yang diambil

Dari hasil RTM audit PKM yang telah dilaksanakan di Fakultas Hukum, Dekan memberikan solusi atas pemecahan masalah serta peningkatan dan tindak lanjut dari akar penyebab masalah yang menjadi temuan pada saat audit.

4. Evaluasi Audit PKM Program Studi

Secara keseluruhan belum ada tindakan yang ditetapkan oleh Fakultas Hukum atas RTM tentang Audit Penelitian.Program studi.S1 Ilmu Hukum.

Fakultas Hukum memiliki dua Program Studi, yaitu S1 Ilmu Hukum dan Prodi S2 Hukum. Dalam pelaksanaan audit PKM, Badan Penjamin Mutu (BPM) Unesa hanya menjadwalkan audit pada prodi S1 ilmu Hukum saja sedangkan Prodi S2 Hukum tidak ada audit, sehingga dalam laporan PKM ini hanya menyampaikan hasil evaluasi audit pada prodi S1 ilmu Hukum saja.

Dari hasil audit tidak ditemukan adanya temuan, namun saat dilihat dari bukti dokumen terdapat indikator 10.1.1.15 penggunaan sarpras yang difasilitasi oleh lembaga untuk kegiatan PKM tidak disertakan bukti dokumen berupa surat pengajuan penggunaan atau peminjaman sarpras. Dengan alasan itu, Tim GPM mencatatnya sebagai temuan ketidaksesuaian (KTS) yang harus dilengkapi Koord Prodi S1 Ilmu Hukum selaku auditee maksimal bulan Des 2024.

Tabel 1. Rekapitulasi Hasil Audit PKM

Program Studi	No. Indikator	Temuan	Akar Penyebab	Tindak Lanjut	Tanggal Tindak Lanjut	Status
S1 Ilmu Hukum	10.1.1.15	Tidak ada dokumen penggunaan sarpras yang difasilitasi oleh lembaga untuk kegiatan PKM	Tidak ada dokumen bukti pengajuan penggunaan sarpras dari tim PKM, seperti surat pengajuan peminjaman LCD dan Kamera	Informasi pemberitahuan penggunaan sarpras sebagai fasilitas untuk kegiatan PKM bagi dosen PemberiTIm PKM membuat surat pengajuan penggunaan sarpras ke Koord Prodi	Des 2024	open

*Data di atas merupakan jumlah ketidaksesuaian, rencana tindak lanjut dan target penyelesaian

Lampiran hasil audit dan dokumen lain yang relevan.

Simpulan hasil Audit PKM Prodi S1 Ilmu Hukum sebagai berikut:

1. Pengendalian Temuan KTS Melalui Rapat Tinjauan Manajemen

Berita Acara Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)

Tanggal dan Tempat : 19 Des 2024

Ruang Rapat F3.01.02A

Gedung F3 Fakultas Hukum Unesa

Agenda RTM : Pemaparan Hasil Audit PKM

Peserta RTM : 1. Dekan FH

2. Wakil Dekan 1 FH

3. Wakil Dekan 2 FH

4. Koor Prodi S1 Ilmu Hukum

5. Koor Prodi S2 Hukum

6. Ketua Lab Prodi S1 Ilmu Hukum

7. Kepala Kantor dan Kasie FH

8. Auditor

9. Tim GPM FH

10. UPM S1 Ilmu Hukum

11. UPM S2 Hukum

Akar Penyebab Masalah:

Terdapat 1 akar penyebab masalah :

Tidak ada dokumen bukti pengajuan penggunaan sarpras dari tim PKM, seperti surat pengajuan peminjaman LCD dan Kamera

Pemecahan masalah:

Surat pengajuan penggunaan sarpras dari Tim PKM ke Kord Prodi

Kesimpulan RTM:

**Kesimpulan
RTM**

Ditemukan adanya 1 KTS	Tidak ada temuan saat dilakukan audit PKM, namun ada satu dokumen penggunaan fasilitas sarpras Prodi yang tidak dapat dibuktikan, yaitu tidak ada bukti dokumen surat pengajuan penggunaan sarpras yang difasilitasi lembaga untuk kegiatan PKM dari tim PKM.
------------------------	---

2. Peningkatan dan Tindak Lanjut

No	Peningkatan dan Tindak Lanjut
1	Informasi pemberitahuan penggunaan sarpras sebagai fasilitas untuk kegiatan PKM bagi dosen
2	Tim PKM membuat surat pengajuan penggunaan sarpras ke Koord Prodi

Dokumentasi Pelaksanaan Audit

Dokumentasi Pelaksanaan Audit S1 Ilmu Hukum



Dokumentasi Pelaksanaan RTM



zoom Workplace Meeting Nurul Hikmah's screen Recording View X

FM-D-RTM atas tindak lanjut FM-02-Nurul RTM Kamis 19122024 MONEV PEMBELAJARAN SEM GASA

FORMULIR

DOKUMEN TINDAK LANJUT RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

No. Dikusumah: FM02-014-AU-001

No. Rencana: 00

Tgl Berlaku: 2023

Kelar: 1 des 2

Lampiran Nodaan Rapat Tinjauan Manajemen Tanggal 19 Desember 2024

AUDIT PENELITIAN_Prodi S1 Ilmu Hukum

No	Masalah	Pemecahan	Penanggung Jawab	Rencana Penyelesaian	Realisasi Penyelesaian	Status Penyelesaian
1	Belum ada bukti evaluasi penelitian	Prodi menjadwalkan rapat monitoring dan evaluasi kesesuaian penelitian dengan roadmap penelitian.	Koordinasi Prodi	Nop 2024		Open
2	Belum ada bukti penggunaan hasil evaluasi kesesuaian penelitian	Prodi mengevaluasi kesesuaian penelitian dengan roadmap	Koordinasi Prodi	Nop 2024		Open

Page 1/5 Words: 5,600 AI Spell Check Compatibility Mode

Participants Chat Share Host tools Apps Record More

Audio Video

Nurul Hikmah

Vita Mahardhika

Arinto Nugroho

Bertha Yonata UNESA

Nurul Hikmah

Ariesta Dewi Ciptorini

Khusnul Khotimah



Lampiran. 1 Instrumen Hasil Audit

Instrumen Audit PKM S1 Ilmu Hukum oleh dr. Ariesia Dewi Ciptorini, Sp. N.

	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Gedung Rektorat Unesa Kampus Lidah Surabaya	No: 36-AKREDITASI-Rev02
AUDIT MUTU INTERNAL PKM (PRODI)		

Revisi 2

Audit		Tahap Audit	
Vita Mahazhika, S.H., M.H. (Koord. Prodi S1 Hukum)			
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Bmu Hukum S1	PKM (PRODI)	25 - 12 July 2024	
Wakil Audit	Auditor Ketua	Auditor Anggota	
• Dita Perwitasari, S.H., M.Kn.	dr. Ariesia Dewi Ciptorini, Sp.N.		
Distribusi	Audit	Auditor	BPM

No	Aspek	✓	X	Nama Dokumen	Keterangan
10.1 PKM (Prodi)					
10.1.1	PKM (Prodi)				
10.1.1.1	Prodi menganalisis hasil kegiatan PKM dengan ketercapaian standar prodi dan peti jalan PKM prodi	✓		Analisis hasil kegiatan PKM	TIDAK ADA TEMUAN
10.1.1.2	Lebih dari 25% hasil PKM digunakan dalam kegiatan perkuliahan/pembelajaran	✓		SK PKM dan RPS	TIDAK ADA TEMUAN
10.1.1.3	Adanya implementasi hasil kegiatan PKM pada kegiatan pembelajaran pada tiga tahun terakhir	✓		Laporan akhir pkm	TIDAK ADA TEMUAN
10.1.1.4	Adanya implementasi proses hasil kegiatan PKM pada industri yang sesuai dengan bidang keilmuan	✓		Road map. SK, PKM, laporan evaluasi	TIDAK ADA TEMUAN

FORMULIR

No	Aspek	✓	X	Nama Dokumen	Keterangan
10.1.1.5	Tim Pelaksana PKM wajib memiliki pengalaman metodologi penelitian, keilmuan yang sesuai dengan tiga aspek berikut: 1) bidang keilmuan, 2) jenjang kegiatan, serta 3) tingkat kerumitan dan adilokman sesuai kegiatan	✓		Road map, SK PKM	TIDAK ADA TEMUAN
10.1.1.6	Pelaksanaan PKM sesuai dengan tiga aspek berikut: 1) sasaran, 2) jadwal dan 3) lama pelaksanaan yang direncanakan	✓		Laporan PKM	TIDAK ADA TEMUAN
10.1.1.7	Pelaksanaan PKM dalam rangka penerapan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.	✓		web PKM	TIDAK ADA TEMUAN
10.1.1.8	Pelaksanaan PKM memberikan kontribusi terhadap lima aspek berikut: 1) pengembangan wilayah, 2) inovasi dan/atau teknologi, 3) solusi permasalahan masyarakat, 4) pengembangan kemitraan, dan 5) pemberdayaan masyarakat.	✓		Laporan PKM	TIDAK ADA TEMUAN
10.1.1.9	Adanya CV pelaksana PKM yang memuat kualifikasi akademik dan hasil PKM yang pernah dilakukan	✓		Proposal PKM	TIDAK ADA TEMUAN
10.1.1.10	Hasil PKM telah dikembangkan berdasarkan 4 (empat) aspek yaitu: 1) sasaran kualifikasi akademik, 2) dilakukan tindak lanjut, 3) menginterpretasikan hasil pada pembelajaran dan 4) dipublikasikan (baik dalam seminar/purnal)	✓		Laporan PKM, artikel, RPS	TIDAK ADA TEMUAN

FORM-I

No	Aspek	✓	X	Nama Dokumen	Keterangan
10.1.1.11	Pelaksanaan PKM di prodi telah 1) difasilitasi oleh lembaga dengan baik, 1) ada dukungan sarana dan prasarana; 3) ada penghargaan bagi pelaksana PKM berprestasi	✓		SK PKM tahun 2023	TIDAK ADA TEMUAN
10.1.1.12	Ada lebih dari 25% PKM yang melibatkan mahasiswa dalam 3 tahun terakhir	✓		Laporan PKM	TIDAK ADA TEMUAN
10.1.1.13	Adanya ijin dari perguruan tinggi untuk menggunakan fasilitas terkait dengan tiga aspek berikut 1) penentuan bidang ilmu dari program studi dan area sasaran kegiatan; 2) proses pembelajaran; dan 3) kegiatan PKM	✓		SK PKM tahun 2023	TIDAK ADA TEMUAN
10.1.1.14	Sarana dan prasarana PKM memenuhi empat unsur berikut 1) keselamatan kerja, 2) kesehatan, 3) kenyamanan, dan 4) keamanan pengabdi, masyarakat dan lingkungan	✓		Surat Kesediaan Mitra yang ada di proposal dan foto kegiatan	TIDAK ADA TEMUAN
10.1.1.15	Adanya dokumen penggunaan sarana dan prasarana yang difasilitasi oleh lembaga untuk kegiatan PKM.	✓		surat kesediaan mitra PKM	TIDAK ADA TEMUAN
10.1.1.16	Adanya catatan keterangan prodi dalam pelaksanaan kegiatan PKM sesuai dengan petunjuk jalan PKM prodi	✓		Rapat penentuan kegiatan PKM	TIDAK ADA TEMUAN

Sumbawa, 12 July 2024

Ketua Auditor

Audit
Koord. Prodi S1 Hukum

dr. Ariesia Dewi Ciptorini, Sp.N.



Vita Mahardhika, S.H., M.H.

FORM-II

Lampiran Form 02_ Notulen RTM

	FORMULIR NOTULEN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN	No. Draf : TARO 00000000000000000000
		Ms. Draf : 00
		Tgl. Draf : 2024
		Draf : 00000000000000000000

Waktu Rapat	Kamis, 19 Des 2024
Waktu	13.00 - selesai
Agenda Rapat	
1	Memohon izin pada audi PKM di Prodi ST Ilmu Hukum
2	Memohon izin ketemu dengan rombongan pada audi PKM di Prodi ST Ilmu Hukum
Peran Rapat	
Telepon	
Pengaruh Rapat	
CPNS	
Persepsi Lain	
Tidak ada dokumen pengajuan araper yang ditawarkan oleh komite untuk kegiatan PKM (jadi tidak ada)	
Akar Penyebab Masalah	
Tidak ada dokumen bukti pengajuan pengajuan araper dari Tim PKM, seperti surat pengajuan pemimpinan LCD dan Kamera	
Penyelesaian Masalah	
Surat pengajuan pengajuan araper dari Tim PKM ke Kord Prodi	
Menerima Penyelesaian Masalah dari Penanggung Jawab	
Adanya informasi perbaikan dan dilakukan prosedur (SOP) peningkatan dan pengajuan pengajuan araper kegiatan untuk kegiatan PKM.	
Penanggung Jawab : Kord Prodi ST Ilmu Hukum	
Ketangguhan : ST	
Tidak ada temuan saat dilakukan audit PKM, namun ada satu dokumen pengajuan terdapat araper Prodi yang tidak dapat dibuktikan, yaitu tidak ada bukti dokumen surat pengajuan pengajuan pengajuan yang ditawarkan oleh komite untuk kegiatan PKM	
Penanggulangan Terdahulu	
<ul style="list-style-type: none"> - Informasi pembentukan programe seperti sebagai bantuan untuk kegiatan PKM bagi dosen - Tim PKM membantu surat pengajuan pengajuan araper ke Kord Prodi 	
Surabaya, 19 Des 2024	
Dibuat oleh	Diketahui Oleh
	 Muhibbin, Lc, MM
Ibu Faga, S.Si, M.H	 Andi Sugiharto, S.Pd, S.H, M.H
Penulis	 Kewu Darmawati Hukum
	 Dina Sulistiawati Hukum

Lampiran Form 03

Dokumen Tindak Lanjut RTM



FORMULIR DOKUMEN TINDAK LANJUT RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

No. Dokumen	FM/OG-DTL/LPM-UNESA
No. Revisi	00
Tgl Berlaku 2023
Halaman	1 dari 1

Lampiran Notulen Rapat Tinjauan Manajemen Tanggal 19 Desember 2024

No	Masalah	Pemecahan	Penanggung Jawab	Rencana Penyelesaian	Realisai Penyelesaian	Status Penyelesaian
1	Tidak adanya dokumen penggunaan sarpras yang difasilitasi oleh lembaga untuk kegiatan PKM (indikator 10.1.1.15)	Surat pengajuan penggunaan sarpras dari Tim PKM ke Kord Prodi S1 Ilmu Hukum	Kord Prodi S1 Ilmu Hukum	Adanya informasi pemberitahuan dan sosialisasi prosedur (SOP) peminjaman dan penggunaan sarpras bagi dosen untuk kegiatan PKM.	Des 2024	Open



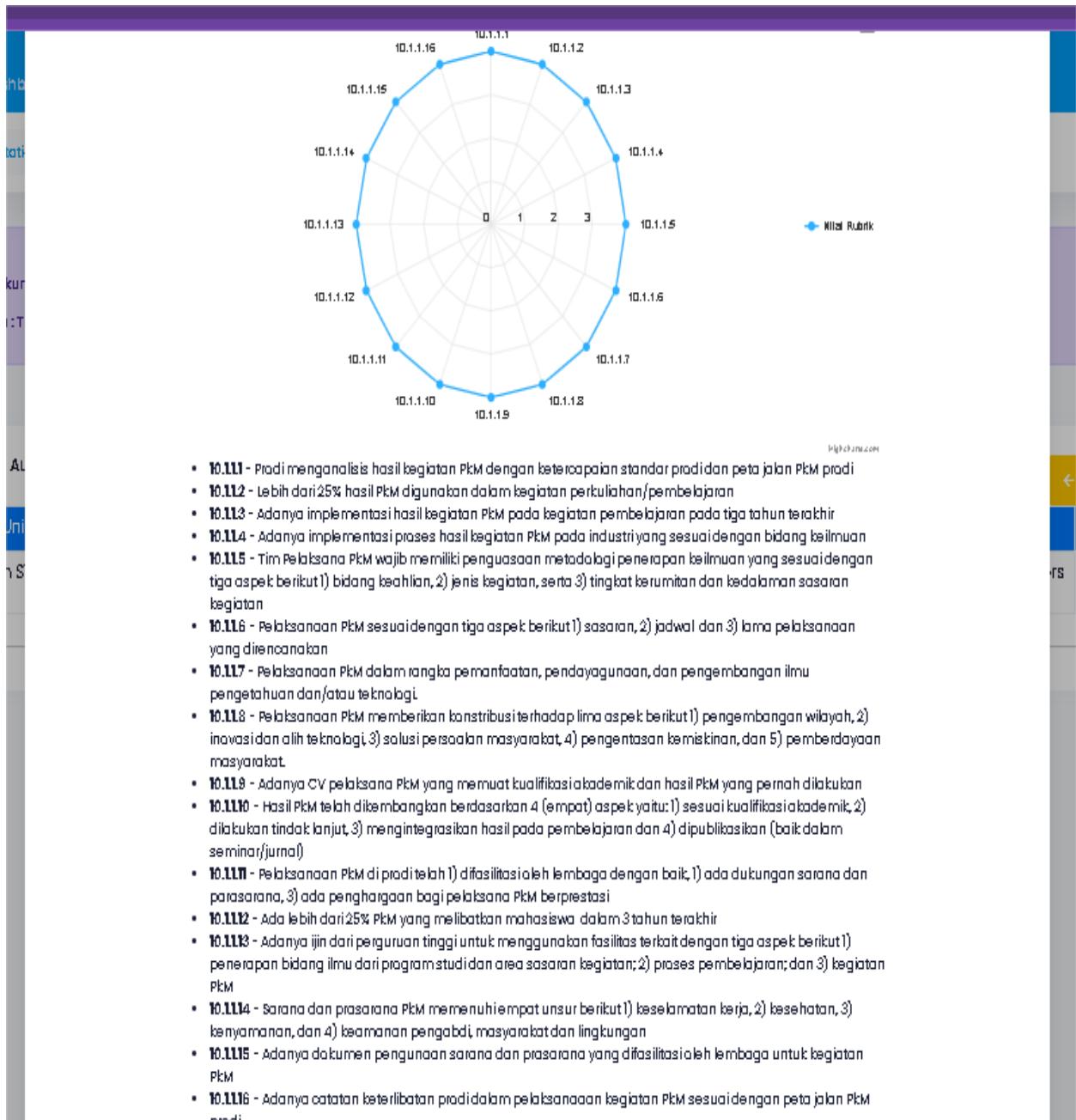
ANALISIS HASIL AUDIT PENGABDIAN 2024

- A. Nama Fakultas : Fakultas Hukum
 B. Nama Prodi : S1 Ilmu Hukum
 C. Tabel 1 hasil analisis Form 4 dari audit pengabdian

No.	No. Indikator	Temuan	Ditemukan pada prodi	Pengendalian (Rencana & Jadwal Pencegahan)
1	10.1.1.1	Tidak ada temuan	S1 Ilmu Hukum	-
2	10.1.1.2	Tidak ada temuan	S1 Ilmu Hukum	-
3	10.1.1.3	Tidak ada temuan	S1 Ilmu Hukum	-
4	10.1.1.4	Tidak ada temuan	S1 Ilmu Hukum	-
5	10.1.1.5	Tidak ada temuan	S1 Ilmu Hukum	-
6	10.1.1.6	Tidak ada temuan	S1 Ilmu Hukum	-
7	10.1.1.7	Tidak ada temuan	S1 Ilmu Hukum	-
8	10.1.1.8	Tidak ada temuan	S1 Ilmu Hukum	-
9	10.1.1.9	Tidak ada temuan	S1 Ilmu Hukum	-
10	10.1.1.10	Tidak ada temuan	S1 Ilmu Hukum	-
11	10.1.1.11	Tidak ada temuan	S1 Ilmu Hukum	-
12	10.1.1.12	Tidak ada temuan	S1 Ilmu Hukum	-
13	10.1.1.13	Tidak ada temuan	S1 Ilmu Hukum	-
14	10.1.1.14	Tidak ada temuan	S1 Ilmu Hukum	-
15	10.1.1.15	Tidak adanya dokumen penggunaan sarpras yang difasilitasi oleh lembaga untuk kegiatan PKM	S1 Ilmu Hukum	Adanya informasi pemberitahuan dan sosialisasi prosedur (SOP) penggunaan sarpras bagi dosen untuk kegiatan PKM. Des 2024
16	10.1.1.16	Tidak ada temuan	S1 Ilmu Hukum	-

- D. Deskripsi peningkatan
- Dari hasil observasi tidak ada catatan auditor mengenai hasil temuan (tidak ada temuan)
 - Sebagai saran : perlu ada pemahaman persepsi mengenai substansi pertanyaan instrumen dengan bukti dokumen yang diperlukan.
 - Bukti dokumen yang diperlukan dalam pemenuhan terlaksananya kegiatan PKM harus valid dan sesuai instrumen.

- E. Jaring laba-laba temuan audit



- **10.II.1** - Prodi menganalisis hasil kegiatan PKM dengan ketercapaian standar prodi dan peta jalan PKM prodi
- **10.II.2** - Lebih dari 25% hasil PKM digunakan dalam kegiatan perkuliahan/pembelajaran
- **10.II.3** - Adanya implementasi hasil kegiatan PKM pada kegiatan pembelajaran pada tiga tahun terakhir
- **10.II.4** - Adanya implementasi proses hasil kegiatan PKM pada industri yang sesuai dengan bidang keilmuan
- **10.II.5** - Tim Pelaksana PKM wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan tiga aspek berikut 1) bidang keahlian, 2) jenis kegiatan, serta 3) tingkat kerumitan dan kedalamannya sasaran kegiatan
- **10.II.6** - Pelaksanaan PKM sesuai dengan tiga aspek berikut 1) sasaran, 2) jadwal dan 3) lama pelaksanaan yang direncanakan
- **10.II.7** - Pelaksanaan PKM dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi
- **10.II.8** - Pelaksanaan PKM memberikan kontribusi terhadap lima aspek berikut 1) pengembangan wilayah, 2) inovasi dan alih teknologi, 3) solusi persoalan masyarakat, 4) pengentasan kemiskinan, dan 5) pemberdayaan masyarakat
- **10.II.9** - Adanya CV pelaksana PKM yang memuat kualifikasi akademik dan hasil PKM yang pernah dilakukan
- **10.II.10** - Hasil PKM telah dikembangkan berdasarkan 4 (empat) aspek yaitu: 1) sesuai kualifikasi akademik; 2) dilakukan tindak lanjut; 3) mengintegrasikan hasil pada pembelajaran dan 4) dipublikasikan (baik dalam seminar/jurnal)
- **10.II.11** - Pelaksanaan PKM di prodi telah 1) difasilitasi oleh lembaga dengan baik; 1) ada dukungan sarana dan prasarana, 2) ada penghargaan bagi pelaksana PKM berprestasi
- **10.II.12** - Ada lebih dari 25% PKM yang melibatkan mahasiswa dalam 3 tahun terakhir
- **10.II.13** - Adanya ijin dari perguruan tinggi untuk menggunakan fasilitas terkait dengan tiga aspek berikut 1) penerapan bidang ilmu dari program studi dan area sasaran kegiatan; 2) proses pembelajaran; dan 3) kegiatan PKM
- **10.II.14** - Sarana dan prasarana PKM memenuhi empat unsur berikut 1) keselamatan kerja, 2) kesehatan, 3) kenyamanan, dan 4) keamanan pengabdian, masyarakat dan lingkungan
- **10.II.15** - Adanya dokumen penggunaan sarana dan prasarana yang difasilitasi oleh lembaga untuk kegiatan PKM
- **10.II.16** - Adanya catatan keterlibatan prodi dalam pelaksanaan kegiatan PKM sesuai dengan peta jalan PKM prodi

F. Deskripsi jaring laba-laba

Hasil Jaring laba-laba menunjukkan bahwa Prodi telah melaksanakan PKM sesuai dengan instrumen. Ketercapaian hasil kegiatan PKM telah dilakukan analisis berdasarkan ketercapaian standar prodi dan roadmap PKM. selama tiga tahun terakhir, lebih dari 25% hasil PKM yang diimplementasikan dalam pembelajaran dan diimplementasikan industri yang sesuai bidang keilmuan. Penguasaan metodologi penerapan keilmuan oleh tim PKM sesuai dengan aspek keahlian, jenis kegiatan serta tingkat kerumitan dan sasaran kegiatan. Pelaksanaan PKM dilaksanakan dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan dan pengembangan IPTEK serta memberikan kontribusi terhadap aspek pengembangan wilayah, inovasi dan alih teknologi, solusi persoalan masyarakat, pengentasan kemiskinan dan pembelajaran masyarakat

dengan memperhatikan aspek sasaran, jadwal dan lamanya pelaksanaan yang direncanakan. Hasil PKM didesiminasi melalui seminar nasional, seminar internasional serta dipublikasikan melalui jurnal ilmiah, prosiding dan media online. Kegiatan PKM telah difasilitasi oleh lembaga dengan baik melalui pemberian dukungan sarpras, penggunaan fasilitas untuk penerapan bidang ilmu serta mendukung area sasaran sebagai lokasi yang dipilih. Dukungan sarpras yang difasilitasi oleh lembaga agar didokumentasikan dan dilengkapi catatan sebagai notulensi hasil rapat prodi sebagai wujud dukungan atas terselenggaranya kegiatan PKM oleh dosen. Lebih dari 25% mahasiswa dilibatkan dalam kegiatan PKM sehingga menunjukkan adanya ketercapaian standar prodi dan roadmap PKM.

G. Kesimpulan deskripsi temuan

Secara umum ketercapaian standar Prodi dalam melaksanakan PKM telah sesuai dengan roadmap. Lembaga telah memberikan fasilitas melalui sarana prasarana untuk pemanfaatan dan pengembangan IPTEK dengan menyesuaikan aspek keahlian tim peneliti, namun belum memperhatikan kualifikasi akademik.